



**RINGKASAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sebagaimana ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bahwa telah disusun Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024, menggunakan Sistematisa yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kami beserta Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berupaya menyusun Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 ini dengan sebaik-baiknya. Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2024, agar bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 10 Maret 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU



DAFTAR ISI
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
ROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DASAR HUKUM	1
DATA GEOGRAFIS WILAYAH	5
CAPAIAN KINERJA MAKRO	10
RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR	11
HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024	17
OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	18
REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH	18
INOVASI DAERAH	32
PENUTUP	48



**RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024**

Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik



- Indonesia Nomor 6516) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang



- Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 1);
 16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan



- Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 4);
 18. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 Nomor 13);
 19. Peraturan Gubernur Nomor 16 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 16) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 (Berita Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 19);
 20. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 28) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 1);



Data Geografis Wilayah

Pada Tahun 1950 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan telah dibentuk Provinsi Otonomi Sumatera Selatan, yang wilayahnya meliputi Daerah Keresidenan Palembang, Keresidenan Bengkulu, Keresidenan Lampung dan Keresidenan Bangka Belitung dengan Ibukotanya berkedudukan di Kota Palembang.

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tanggal 26 Juni 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tersebut ditetapkan menjadi Undang-undang.

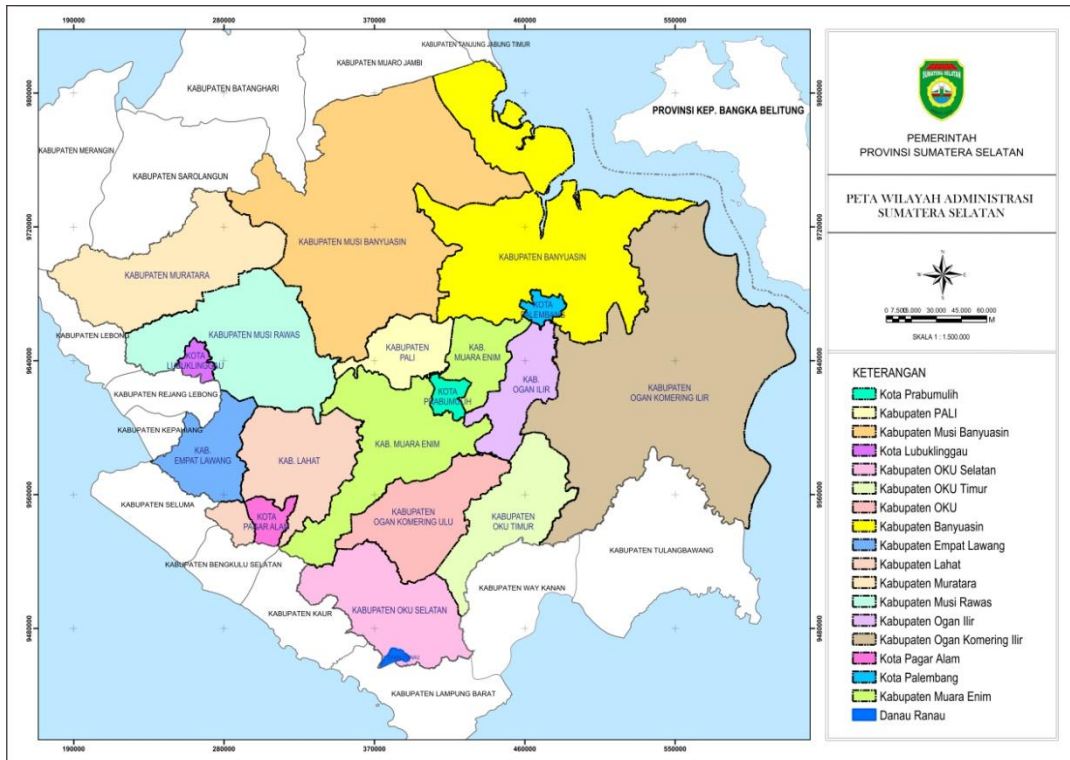
Provinsi Sumatera Selatan terletak antara 1°-4° Lintang Selatan dan 102°-106° Bujur Timur dengan batas administrasi:

- a. Di sebelah Utara dengan Provinsi Jambi.
- b. Di sebelah Selatan dengan Provinsi Lampung
- c. Di sebelah Timur dengan Provinsi Bangka Belitung
- d. Di sebelah Barat dengan Provinsi Bengkulu.

Adapun peta administrasi Provinsi Sumatera Selatan seperti tertera pada gambar berikut :



Gambar
Peta Administrasi Provinsi Sumatera Selatan



Luas Wilayah Provinsi Sumatera Selatan adalah 86.771.684 Km² dengan rincian sebagai berikut :

Tabel
Luas Wilayah Provinsi Sumatera Selatan

NO	KABUPATEN/KOTA	LUAS WILAYAH KM2
1	OGAN KOMERING ULU	3.774,497
2	OGAN KOMERING ILIR	17.071,333
3	MUARA ENIM	6.763,912
4	LAHAT	4.333,065
5	MUSI RAWAS	6.122,588
6	MUSI BANYUASIN	14.550,788



7	BANYUASIN	12.262,756
8	OKU TIMUR	3.412,716
9	OKU SELATAN	4.369,252
10	OGAN ILIR	2.302,858
11	EMPAT LAWANG	2.234,097
12	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	1.842,563
13	MUSI RAWAS UTARA	5.937,803
14	PALEMBANG	352,506
15	PAGAR ALAM	625,913
16	LUBUK LINGGAU	367,726
17	PRABUMULIH	447,311

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019

Kawasan timur sampai garis pantai bagian daratan di dominasi rawa-rawa dan lebak yang dipengaruhi pasang surut. Di bagian tengah dan makin ke barat merupakan dataran rendah dan lembah-lembah luas. Bagian Barat Sumatera Selatan terdiri dari perbukitan dan pegunungan yang merupakan mata rantai dari Bukit Barisan yang membentang di Pulau Sumatera mulai dari Aceh sampai Lampung. Puncak-puncak Bukit Barisan di Sumatera Selatan diantaranya adalah Gunung Dempo (3,159 M) Gunung Seminung (1.954 M), Gunung Patah (2.107 M), Gunung Bungkok (2.125 M). Di kaki Gunung Seminung terdapat Danau Ranau yang luasnya 128 km² dengan panorama alam yang indah dan juga ideal untuk olahraga air seperti ski, menyelam, renang dan kano. Kawasan pegunungan dan perbukitan tersebut sebagian besar masih diselimuti hutan lebat sampai ke dataran rendah, umumnya berada pada ketinggian 900-1.200 M di atas permukaan laut. Kawasan ini juga merupakan sumber mata air utama dari sungai-sungai besar di Sumatera Selatan yang sebagian besar bermuara di Selat Bangka.



a. Jumlah Penduduk

Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 86.771.684 Km² didiami penduduk pada tahun 2024 sebanyak 9.064.690 jiwa. Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 86.771.684 Km² didiami penduduk pada tahun 2024 semester II (31 Desember 2024) sebanyak 9.064.690 jiwa. Luas wilayah Provinsi Sumatera Selatan dengan rincian sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini:

NO	KABUPATEN/KOTA	LUAS WILAYAH KM2
1	OGAN KOMERING ULU	3.774.497
2	OGAN KOMERING ILIR	17.071.333
3	MUARA ENIM	6.763.912
4	LAHAT	4.333.065
5	MUSI RAWAS	6.122.588
6	MUSI BANYUASIN	14.550.788
7	BANYUASIN	12.262.756
8	OKU TIMUR	3.412.716
9	OKU SELATAN	4.369.252
10	OGAN ILIR	2.302.858
11	EMPAT LAWANG	2.234.097
12	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	1.842.563
13	MUSI RAWAS UTARA	5.937.803
14	PALEMBANG	352.506
15	PAGAR ALAM	625.913
16	LUBUK LINGGAU	447.311
17	PRABUMULIH	447.311

b. Jumlah Kabupaten/Kota

Penduduk ini tersebar di 17 Kabupaten / Kota, 241 Kecamatan dan 3.258 Desa/Kelurahan. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kota Palembang sebanyak 1.801.367 Jiwa, sedangkan penduduk terkecil terdapat di Kota Pagar Alam yaitu sebanyak 153.271 Jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 4.616.445 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 4.448.245 jiwa sebagaimana tertera pada tabel dibawah :



REKAPITULASI DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN PER KECAMATAN (DAK-2)
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN SEMESTER II (31 DESEMBER 2024)
PER KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH PENDUDUK			DATA KELUARGA
				LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1	OGAN KOMERING ULU	13	157	199.719	190.329	390.048	119.073
2	OGAN KOMERING ILIR	18	327	411.305	389.754	801.059	260.106
3	MUARA ENIM	22	255	333.560	320.171	653.731	203.222
4	LAHAT	24	378	229.204	218.937	448.141	140.249
5	MUSI RAWAS	14	199	218.376	209.347	427.723	136.675
6	MUSI BANYUASIN	15	242	378.473	358.424	736.897	227.974
7	BANYUASIN	21	313	454.414	433.910	888.324	280.479
8	OKU TIMUR	20	312	355.275	339.557	694.832	220.969
9	OKU SELATAN	19	259	211.134	195.804	406.938	125.079
10	OGAN ILIR	16	241	225.871	220.149	446.020	137.939
11	EMPAT LAWANG	10	156	173.894	162.889	336.783	109.954
12	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	5	71	108.942	105.853	214.795	64.842
13	MUSI RAWAS UTARA	7	89	103.582	100.106	203.688	63.464
14	PALEMBANG	18	107	901.923	899.444	1.801.367	543.285
15	PAGAR ALAM	5	35	78.395	74.876	153.271	46.857
16	LUBUK LINGGAU	8	72	124.846	122.704	247.550	76.134
17	PRABUMULIH	6	45	107.532	105.991	213.523	64.272
	JUMLAH	241	3,258	4.616.445	4.448.245	9.064.690	2.820.573

Sumber Data : Kementerian Dalam Negeri



1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel

Capaian Kinerja Makro Provinsi Sumatera Selatan

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Perubahan (%)*
1	Indeks Pembangunan Manusia	73.18	73.84	0.902%
2	Angka Kemiskinan	11.78	10.97	-6.876%
3	Angka Pengangguran	4.11	3.86	-6.083%
4	Pertumbuhan Ekonomi	5.08	5.03	-0.984%
5	Pendapatan Per Kapita (PDRB Per Kapita ADHB)	71.96	75.13	4.405%
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0.338	0.331	-2.071%

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan

Keterangan:

- Kolom (1) diisi nomor urut
- Kolom (2) diisi nama indikator kinerja makro
- Kolom (3) diisi capaian kinerja indikator kinerja makro tahun sebelumnya
- Kolom (4) diisi capaian kinerja indikator kinerja makro tahun pelaporan
- Kolom (5) diisi dengan persentase perubahan capaian kinerja makro,



2. Ringkasan Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja	Ket
1.a.1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah atas = 417.165 Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada provinsi yang bersangkutan = 422.304	98,78	
1.a.2	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 4- 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun penyandang disabilitas yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan khusus = 5.336 Jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun penyandang disabilitas pada provinsi yang bersangkutan = 5.517	96,72	
1.b.1	Kesehatan	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di seluruh provinsi = 10.169 Jumlah Penduduk provinsi = 9.064.690	1.12	
1.b.2	Kesehatan	Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan provinsi yang terakreditasi = 2 Jumlah RS provinsi = 2	100	



No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja	Ket
1.b.3	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun = 6.917 Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana = 6.917	100	
1.b.4	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar = 156 Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB = 156	100	
1.c.1.1	PU dan PR	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan provinsi (ha) = 0 Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan provinsi (ha) = 1.	0	
1.c.1.2	PU dan PR	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi (m) = 0 Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan provinsi (m) = 1	0	



No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja	Ket
1.c.2	PU dan PR	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting = 51.385 luas daerah irigasi kewenangan provinsi = 91.050	56,44	
1.c.3	PU dan PR	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	Jumlah kumulatif kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota = 0. Jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/ kota di provinsi bersangkutan. = 1.	0	
1.c.4	PU dan PR	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	Total volume limbah yang masuk dalam SPAL Domestik Regional = 0. Total kapasitas pengolahan limbah SPAL Domestik Regional = 1	0	
1.c.5	PU dan PR	Rasio kemantapan jalan	Panjang jalan kewenangan provinsi yang mantap = 1.617,1 Panjang jalan keseluruhan di wilayah provinsi = 1.779,27	90,88	



No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja	Ket
1.c.6	PU dan PR	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli = 160 jumlah kebutuhan tenaga ahli di wilayah provinsi = 160	100	
1.d.1	Perkim	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n = 0 Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n = 1.	0	
1.d.2	Perkim	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni = 0 Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan = 1	0	
1.d.3	Perkim	Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani = 89.9927 Luas kawasan kumuh 10-15 Ha = 789.743	11,39	
1.d.4	Perkim	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Jumlah satuan perumahan yang sedang dibangun terfasilitasi PSU = 269 Jumlah satuan perumahan = 638	42.16	



No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja	Ket
1.e.1	Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang diselesaikan = 36. Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk = 36	100	
1.e.2	Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan = 12. Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi = 12	100	
1.e.3	Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen kebencanaan yang disusun = 6 Jumlah dokumen kebencanaan yang akan disusun = 6.	100	
1.e.4	Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penanganan pra bencana	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan pra bencana = 17. Jumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi = 17	100	
1.e.5	Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan tanggap darurat bencana = 17. Jumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang mengalami bencana = 17	100	



No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja	Ket
1.f.1	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya = 20. Populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti = 20.	100	
1.f.2	Sosial	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah Anak Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya = 130. Jumlah Anak Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti = 130	100	
1.f.3	Sosial	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah Lanjut Usia Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya = 200. Populasi Lanjut Usia Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti = 200.	100	
1.f.4	Sosial	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah Gelandangan dan Pengemis di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya = 180. Populasi Gelandangan dan Pengemis Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti = 180.	100	



No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja	Ket
1.f.5	Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya = 6.846 Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah provinsi yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah provinsi = 6.846	100	

3. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat EPPD adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. EPPD dilakukan untuk menilai kinerja keberhasilan pemerintah daerah baik secara keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terbagi dalam empat kategori yakni rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. EPPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 ditargetkan dengan nilai Sedang dengan angka (3,0) dengan realisasi pada tahun 2024 nilai LPPD belum keluar dari KEMENDAGRI nilai yang dikeluarkan terakhir pada tahun 2022 sebesar 3,4811, realisasi indikator LPPD tahun 2022 diperoleh berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Sumatera Selatan. Untuk realisasi penilaian Laporan Penyusunan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2023 masih disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI tentang Capaian Hasil Peringkat LPPD Provinsi dan



Kabupaten/Kotaakan tetapi belum dikeluarkan sampai dengan sekarang oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Untuk penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023 Ranking Nasional masih dalam proses penilaian Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Untuk penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Ranking Nasional hanya berupa Piagam Penghargaan.

4. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Tahun Sebelumnya

Opini Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Provinsi Sumatera Selatan sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2024 memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK,

5. Realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah

Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada Tahun Anggaran 2024, Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan ditargetkan penerimaannya sebesar Rp. 11.429.573.726.458,00 dan sampai akhir tahun 2024 dapat terealisasi sebesar Rp. 10.965.339.946.352,45 atau 95,94%. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah mencapai target yang telah ditetapkan atau 101,45%. Sebagian besar komponen PAD mencapai target yang telah ditetapkan seperti Pajak Daerah yang menjadi tugas pokok Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tercapai sebesar 107,31%, penerimaan Retribusi Daerah terealisasi sebesar 110,59%, penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terealisasi sebesar 83,83%, dan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar 65,55%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :



**TARGET DAN REALISASI
PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH (PATDA)
PROVINSI SUMATERA SELATAN S.D 31 DESEMBER 2024**

NO	URAIAN	TARGET APBD	REALISASI	(%)
1.	PENDAPATAN DAERAH	11.429.573.726.458,00	10.965.339.946.352,45	95,94
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.236.576.566.867,00	5.312.599.844.673,45	101,45
	A. Pendapatan Pajak Daerah	4.421.557.653.495,00	4.744.701.180.376,87	107,31
	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.211.685.750.280,00	1.275.598.540.884,00	105,27
	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	1.097.291.212.352,00	1.162.920.590.375,00	105,98
	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	1.378.439.652.000,00	1.623.265.639.257,82	117,76
	Pajak Air Permukaan (PAP)	13.902.720.000,00	21.499.938.654,05	154,65
	Pajak Rokok	720.238.318.863,00	661.592.974.406,00	91,86
	B. Pendapatan Retribusi	7.484.658.673,00	8.277.558.358,00	110,59
	C. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	165.607.917.094,00	138.824.929.544,35	83,83
	D. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	641.926.337.605,00	420.796.176.394,23	65,55
1.2	PENDAPATAN TRANSFER PUSAT	6.188.978.191.591,00	5.648.721.133.679,00	91,27
	I. Pendapatan Transfer Pemerintah pusat	6.188.978.191.591,00	5.648.721.133.679,00	91,27
	A. Dana Perimbangan	6.182.352.650.591,00	5.642.095.592.679,00	91,26
	B. Insentif Fiskal	6.625.541.000,00	6.625.541.000,00	100,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.018.968.000,00	4.018.968.000,00	100,00
	A. Pendapatan Hibah :	4.018.968.000,00	4.018.968.000,00	100,00
	- Jasa Raharja	4.018.968.000,00	4.018.968.000,00	100,00
	TOTAL PENDAPATAN DAERAH	11.429.573.726.458,00	10.965.339.946.352,45	95,94

**Di Update Tgl. 18-02-25*

Data Belum Audit BPK

Penerimaan pendapatan daerah tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.093.999.042.002,70 atau 11,08% dibandingkan dengan penerimaan tahun 2023 seperti tabel berikut:



Tabel
Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah
Provinsi Sumsel Tahun 2023 Dan 2024

No	Uraian	Realisasi		Tambah/Kurang	(%)
		2023	2024		
1	Pendapatan Asli Daerah	5.199.841.748.586,80	5.312.599.844.673,45	112.758.096.086,65	2,17
2	Pendapatan Transfer	4.667.616.469.087,00	5.648.721.133.679,00	981.104.664.592,00	21,02
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	3.882.686.676,00	4.018.968.000,00	136.281.324,00	3,51
Jumlah Pendapatan Daerah		9.871.340.904.349,80	10.965.339.946.352,45	1.093.999.042.002,70	11,08

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2024

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Prov. Sumsel tahun 2024 terdiri dari komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pada Tahun Anggaran 2024 penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan ditargetkan sebesar Rp.5.236.576.566.867,00 sampai akhir tahun 2024 dapat terealisasi sebesar Rp. 5.312.599.844.673,45 atau 101,45%. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2023 sebesar Rp.5.199.841.748.586,80 mengalami peningkatan sebesar Rp. 112.758.096.086,65 atau 2,17%.

Penerimaan PAD dibandingkan tahun 2023 mengalami peningkatan dikarenakan pemberian program pemutihan pajak dari 19 Agustus s.d. 14 Desember 2024 berupa keringanan Pajak Kendaraan Bermotor, pengurangan bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua (50%) dan seterusnya, pembebasan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor, dan pembebasan sanksi administratif bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua



dan seterusnya serta pembebasan pajak progresif kendaraan bermotor tahun 2024, cukup efektif dalam meringankan beban masyarakat serta optimalisasi penerimaan pajak dengan *door to door service* dan pelaksanaan operasi kepatuhan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah dari sektor pajak. Hal ini dapat dilihat dari penerimaan PAD sektor Pajak Daerah yang merupakan tugas dan fungsi pokok Bapenda Provinsi Sumatera Selatan dengan capaian sebesar 107,31 %.

2. Pendapatan Transfer

Bagian Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan dan Insentif Fiskal pada Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp.6.188.978.191.591,00 terealisasi sebesar Rp.5.648.721.133.679,00 atau 91,27%. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2023 sebesar Rp. 4.667.616.469.087,00 realisasi penerimaan tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp. 981.104.664.592,00 atau 21,02%. Peningkatan ini terjadi dikarenakan adanya perubahan kebijakan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) dengan program *Treasury Deposit Facility* yang selanjutnya disingkat TDF merupakan fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia serta kurang salur pemerintah pusat untuk tahun 2023.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pada tahun anggaran 2024, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp.4.018.968.000,00 terealisasi sebesar Rp.4.018.968.000,00 atau 100,00%. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2023 sebesar Rp. 3.882.686.676,00 namun di tahun 2024 realisasi penerimaan hibah mengalami peningkatan sebesar Rp. 136.281.324,00 atau 3,51%, dikarenakan peningkatan penerimaan dana hibah Jasa Raharja.



PENGELOLAAN PENDAPATAN

Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada Tahun Anggaran 2024, Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan ditargetkan penerimaannya sebesar Rp.11.429.573.726.458,00 dan sampai akhir tahun 2024 dapat terealisasi sebesar Rp. 10.965.339.946.352,45 atau 95,94%. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah mencapai target yang ditetapkan atau 101,45%. Sebagian besar komponen PAD mencapai target yang telah ditetapkan seperti Pajak Daerah yang menjadi tugas pokok Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tercapai sebesar 107,31%, penerimaan Retribusi Daerah terealisasi sebesar 110,59%, penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terealisasi sebesar 83,83%, dan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar 65,55%.

PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1. Permasalahan

Pengelolaan Pendapatan Daerah (PATDA) Provinsi Sumatera Selatan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, baik itu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan ditahun 2024 ditargetkan penerimaannya sebesar Rp. 11.429.573.726.458,00 terealisasi sebesar Rp. 10.965.339.946.352,45 atau 95,94%. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari target sebesar Rp.5.236.576.566.867,00 terealisasi sebesar Rp. 5.312.599.844.673,45 atau 101,45%. Penerimaan transfer dari pemerintah pusat belum mencapai target yang ditetapkan, akan tetapi dalam batas yang wajar sesuai dengan realisasi penerimaan pemerintah pusat, sedangkan Lain-lain PATDA yang sah sudah mencapai target yang ditetapkan.

Beberapa kendala yang menjadi faktor penyebab tidak tercapainya target Pendapatan Daerah Tahun 2024 antara lain :

- 1) Secara umum, pengendalian inflasi di Sumatera Selatan masih

- memberikan pengaruh terhadap pendapatan daerah.
- 2) Perubahan kebijakan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) dengan program Treasury Deposit Facility yang selanjutnya disingkat TDF merupakan fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia.
 - 3) Perkembangan BUMD belum menggembirakan, sehingga kontribusi yang diberikan terhadap PAD belum optimal.
 - 4) Belum optimalnya pemanfaatan Informasi Teknologi.
 - 5) Belum Optimalnya Pengembangan kualitas sumber daya manusia.
 - 6) Sarana dan prasarana pemungutan pajak daerah masih belum memadai dan perlu ditingkatkan lagi.
 - 7) Belum optimalnya kerjasama dengan mitra kerja terkait upaya peningkatan penerimaan pendapatan daerah Prov. Sumsel.

2. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Permasalahan

Dalam upaya mengatasi berbagai masalah yang menyebabkan belum optimalnya penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Badan Pendapatan Daerah melakukan berbagai kebijakan strategis sebagai berikut :

a. Pajak Daerah:

- 1) Memberikan program pemutihan pajak dari 19 Agustus s.d. 14 Desember 2024 berupa keringanan Pajak Kendaraan Bermotor, pengurangan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua (50%) dan seterusnya, pembebasan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor, dan pembebasan sanksi administratif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya serta pembebasan pajak progresif kendaraan bermotor tahun 2024.
- 2) Memanfaatkan teknologi untuk mempermudah transaksi pembayaran pajak daerah seperti, pembayaran secara non tunai menggunakan mesin EDC, QRIS, mobile dan internet banking, mesin ATM.



- 3) Optimalisasi pendapatan daerah melalui program *door to door service*, operasi kepatuhan.
- 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Bapenda Prov. Sumsel melalui pendidikan formal dan informal secara bertahap.
- 5) Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pemungutan pendapatan daerah secara bertahap terutama untuk UPTB baru.
- 6) Terus membangun sinergitas dengan mitra kerja (Tim Pembina Samsat Prov. Sumsel) :
 - Kerjasama dengan Ditlantas dan Jasa Raharja melalui kegiatan razia kendaraan bermotor;
 - Pendampingan tim korsupgah KPK dalam optimalisasi pendapatan daerah;
 - Integrasi data wajib pajak pusat dengan data wajib pajak daerah pada Dirjen Pajak Kementerian Keuangan;
 - Perpanjangan kerjasama dengan BP Batam dalam rangka back up database server utama yang ada main/recovery data;
 - Perpanjangan kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka penambahan kuato akses data kependudukan.
- 7) Terus melakukan rapat koordinasi dengan OPD pemungut retribusi dan BUMD/BUMS yang menerima penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara rutin.
- 8) Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak menuju pelayanan prima melalui inovasi-inovasi pelayanan yang dilakukan masing-masing UPTB.
- 9) Memperkuat sistem informasi teknologi secara bertahap terus membenahi sistem IT melalui kerjasama dengan pihak ketiga.
- 10) Meningkatkan pengawasan internal badan dan melakukan koordinasi dengan institusi pengawasan lainnya.
- 11) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya pembayaran pajak dan retribusi daerah.



- 12) Kerjasama dengan pemerintah Kab/Kota untuk berkontribusi dalam Optimalisasi Pajak Daerah.
- 13) Memperluas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penambahan titik pelayanan baru seperti samsat desa dan samsat drive thru.
- 14) Pembangunan dan pengembangan aplikasi samsat bapenda, perbaikan Sistem Informasi Manajemen (SIM) terkait pengolahan, pengamanan dan up grading data serta peralatan pengolahan data yang lebih canggih dan modern.
- 15) Pengembangan Aplikasi E-Samsat berupa Layanan Samsat Online Nasional dan Layanan Samsat Online Sumsel.
- 16) Secara berkala melaksanakan rapat koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Sumatera Selatan untuk membahas kendala dan permasalahan yang timbul di lapangan.
- 17) Meningkatkan kinerja Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah (OPAD), antara lain :
 - Melakukan penagihan langsung kepada objek-objek pajak daerah di lapangan, seperti objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan Pajak Air Permukaan (PAP) yang berada di semua Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
 - Mengintensifkan pendataan objek Pajak Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan bermotor yang berasal dari luar provinsi (Nopol non-BG) yang beroperasi di Provinsi Sumatera Selatan melalui razia kendaraan bermotor bersama-sama dengan instansi terkait;
 - Melakukan penagihan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor secara persuasif;
 - Melakukan pendekatan dan koordinasi dengan showroom penjual kendaraan bermotor bekas dalam upaya meningkatkan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua (BBN-KB II);



- Meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat akan pentingnya kewajiban membayar pajak melalui penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
- Kegiatan sosialisasi baik media sosial dan terjun langsung kelapangan serta pemberian reward kepada wajib pajak;
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan sarana prasarana, peningkatan kualitas layanan sumber daya manusia, mempercepat proses layanan.

b. Retribusi Daerah:

- 1) Melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan OPD pemungut retribusi;
- 2) Membenahi dan memantapkan sistem dan prosedur administrasi dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan retribusi daerah;
- 3) Melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah;
- 4) Meningkatkan sosialisasi dan pelayanan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar retribusi daerah.
- 5) Membenahi sistem pembayaran dari tunai menjadi Non tunai.
- 6) Soft launching transformasi payment system & realtime report dalam upaya sinergitas peningkatan PAD dari sektor Retribusi Daerah & penyerahan Q-Ris kepada OPD pemungut retribusi.

c. Bagian Penerimaan Hasil Laba BUMD dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:

- 1) Mengupayakan peningkatan penerimaan dari masing- masing Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, antara lain dalam bentuk peningkatan penyertaan modal kepada masing- masing BUMD di lingkungan Pemerintah Sumatera Selatan;
- 2) Mengadakan koordinasi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan guna mencari upaya



untuk meningkatkan penerimaan daerah dari bagi hasil laba BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

- 3) Melakukan evaluasi terhadap potensi yang dapat dimanfaatkan dalam upaya peningkatan kontribusi BUMD, salah satunya dengan membuat rencana bisnis perusahaan.
- 4) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk membentuk Tim kerja terpadu yang bertugas melakukan upaya – upaya strategis dan sistematis untuk meningkatkan kinerja perusahaan seluruh BUMD.

d. Bagian Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah:

- 1) Mengupayakan peningkatan pendapatan di sektor Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah dengan mengoptimalkan dan mengintensifkan jenis-jenis pendapatan dari komponen penerimaan Lain-lain PAD yang Sah antara lain penerimaan jasa giro dari Bank Sumsel Babel dan penerimaan-penerimaan lainnya.
- 2) Meningkatkan kinerja Badan Layanan Unit Daerah (BLUD) dalam menggali pendapatan asli daerah.

PENDAPATAN TRANSFER

Mengupayakan peningkatan Pendapatan Daerah dari sektor penerimaan Pendapatan Transfer, baik komponen penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak. Adapun upaya- upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Melakukan rapat koordinasi dan rekonsiliasi bersama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam rangka membahas Lifting Minyak dan Gas, Bidang Pertambangan Umum.
- 2) Meningkatkan koordinasi bersama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada Kementerian Keuangan RI dalam rangka membahas pelaksanaan penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Bagi Hasil Bidang Pertambangan Umum dan Dana Bagi Hasil Bidang Kehutanan.
- 3) Realisasi dari semua kegiatan tersebut akan dituangkan dalam bentuk

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk selanjutnya akan dijadikan pedoman dan patokan terhadap besarnya pembagian Pendapatan Transfer yang akan diterima oleh masing-masing Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan selanjutnya akan didistribusikan ke masing-masing Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan jatah/porsinya masing-masing.

- 4) Meningkatkan koordinasi dengan OPD teknis terkait syarat salur Dana Bagi Hasil yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dipenuhi sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Upaya optimalisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah antara lain dari sektor Pendapatan Hibah dari beberapa perusahaan BUMN maupun perusahaan BUMS yang berada dan beroperasi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Adapun upaya- upaya optimalisasi atau intensifikasi Pendapatan Daerah dari sektor pendapatan ini dapat dilakukan antara lain:

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan BUMN maupun BUMS agar berperan aktif dan berpartisipasi dalam mendukung program pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan dilakukannya pendekatan yang intensif kepada masing- masing BUMN maupun BUMS tersebut maka diharapkan kepada masing-masing BUMN dan BUMS dapat meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- 2) Terus mengadakan pendekatan kepada beberapa BUMN maupun BUMS yang belum memberikan kontribusi pada Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan berkaitan erat dengan akuntabilitas administrasi publik dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Setiap pejabat publik dituntut untuk dapat bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada publik tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab yang diberika



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
periode 1 Januari s.d 31 Desember 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	$5 = \frac{(4/3)}{x 100}$	6
4	PENDAPATAN DAERAH	11.429.573.726.458,00	10.965.339.946.352,45	95,94	9.871.340.904.349,80
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.236.576.566.867,00	5.312.599.844.673,45	101,45	5.199.841.748.586,80
4.1.01	Pajak Daerah	4.421.557.653.495,00	4.744.701.180.376,87	107,31	4.649.349.674.256,16
4.1.02	Retribusi Daerah	7.484.658.673,00	8.277.558.358,00	110,59	13.182.254.856,40
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	165.607.917.094,00	138.824.929.544,35	83,83	223.885.947.856,26
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	641.926.337.605,00	420.796.176.394,23	65,55	313.423.871.617,98
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.236.576.566.867,00	5.312.599.844.673,45	101,45	5.199.841.748.586,80
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	6.188.978.191.591,00	5.648.721.133.679,00	91,27	4.667.616.469.087,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	6.182.352.650.591,00	5.642.095.592.679,00	91,26	4.667.616.469.087,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	3.226.356.872.991,00	2.645.802.349.840,00	82,01	1.854.637.689.429,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.750.244.931.000,00	1.806.673.215.634,00	103,22	1.653.766.188.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	240.607.136.600,00	236.102.516.086,00	98,13	261.641.344.656,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	965.143.710.000,00	953.517.511.119,00	98,80	897.571.247.002,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	6.182.352.650.591,00	5.642.095.592.679,00	91,26	4.667.616.469.087,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	6.625.541.000,00	6.625.541.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	6.625.541.000,00	6.625.541.000,00	100,00	0,00
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	6.188.978.191.591,00	5.648.721.133.679,00	91,27	4.667.616.469.087,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.018.968.000,00	4.018.968.000,00	100,00	3.882.686.676,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	4.018.968.000,00	4.018.968.000,00	100,00	3.882.686.676,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.018.968.000,00	4.018.968.000,00	100,00	3.882.686.676,00
	JUMLAH PENDAPATAN	11.429.573.726.458,00	10.965.339.946.352,45	95,94	9.871.340.904.349,80



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4/3) x 100	6
5	BELANJA DAERAH	11.613.884.803.146,00	10.908.424.497.431,90	93,93	9.653.373.230.507,08
5.1	BELANJA OPERASI	5.572.610.963.162,00	5.308.864.484.748,94	95,27	4.913.125.539.885,87
5.1.01	Belanja Pegawai	2.662.226.612.724,00	2.529.375.704.900,00	95,01	2.158.618.753.463,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.316.980.631.756,00	2.205.615.578.219,94	95,19	2.297.732.037.187,87
5.1.03	Belanja Bunga	2.900.000.000,00	2.786.684.555,00	96,09	8.817.133.280,00
5.1.05	Belanja Hibah	580.503.718.682,00	561.105.467.074,00	96,66	447.957.615.955,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	10.000.000.000,00	9.981.050.000,00	99,81	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	5.572.610.963.162,00	5.308.864.484.748,94	95,27	4.913.125.539.885,87
5.2	BELANJA MODAL	1.472.333.805.414,00	1.303.072.011.451,71	88,50	1.239.943.154.568,99
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.382.000.000,00	701.091.453,00	29,43	1.743.753.503,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	383.076.710.666,00	272.576.659.179,00	71,15	363.526.584.860,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	275.873.524.718,00	260.181.034.813,71	94,31	266.557.790.089,12
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	751.874.329.402,00	699.678.969.706,00	93,06	541.178.479.003,87
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	54.365.258.374,00	66.149.063.496,00	121,68	65.940.480.613,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	4.761.982.254,00	3.785.192.804,00	79,49	996.066.500,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	1.472.333.805.414,00	1.303.072.011.451,71	88,50	1.239.943.154.568,99
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	21.794.414.409,00	82.301.295,00	0,38	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	21.794.414.409,00	82.301.295,00	0,38	0,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	21.794.414.409,00	82.301.295,00	0,38	0,00



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	$5 = \frac{(4/3)}{x 100}$	6
5.4	BELANJA TRANSFER	4.547.145.620.161,00	4.296.405.699.936,25	94,49	3.500.304.536.052,22
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.399.583.626.924,00	2.399.428.901.098,00	99,99	2.179.118.758.571,00
5.4.02.03	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	2.141.561.993.237,00	1.896.976.798.838,25	88,58	1.321.185.777.481,22
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	6.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	4.547.145.620.161,00	4.296.405.699.936,25	94,49	3.500.304.536.052,22
	JUMLAH BELANJA	11.613.884.803.146,00	10.908.424.497.431,90	93,93	9.653.373.230.507,08
	SURPLUS/DEFISIT	(184.311.076.688,00)	56.915.448.920,55	(30,88)	217.967.673.842,72
6	PEMBIAYAAN DAERAH	184.311.076.688,00	51.630.923.704,36	28,01	(63.159.006.432,81)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	289.311.076.688,00	154.808.628.910,91	53,51	322.795.834.055,19
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	289.311.076.688,00	154.808.628.910,91	53,51	322.795.834.055,19
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	289.311.076.688,00	154.808.628.910,91	53,51	322.795.834.055,19
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	105.000.000.000,00	103.177.705.206,55	98,26	385.954.840.488,00
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	105.000.000.000,00	103.177.705.206,55	98,26	385.954.840.488,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	105.000.000.000,00	103.177.705.206,55	98,26	385.954.840.488,00
	PEMBIAYAAN NETTO	184.311.076.688,00	51.630.923.704,36	28,01	(63.159.006.432,81)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	108.546.372.624,91	0,00	154.808.667.409,91



6. Inovasi Daerah

Inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Daftar inovasi Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

DAFTAR INOVASI DAERAH TAHUN 2023 (INOVASI PELAYANAN PUBLIK, TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN INOVASI LAINNYA) PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	NAMA INSTANSI	JUDUL INOVASI	
1.	Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	1.	Pelayanan Sarana Informasi Digital Staf Ahli Gubernur Provinsi Sumatera Selatan
2.	Biro Humas dan Protokol Provinsi Sumatera Selatan	2.	SI ABA INDAH (Sistem Aplikasi Bank Data Pimpinan Daerah)
3.	Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan	3.	Penyusunan Sistem Informasi Tata Kelola Pelaporan Dana Pembangunan Sektoral di Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan
4.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan	4.	Digitalisasi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk Meningkatkan Kinerja Pelayanan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
5.	Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan	5.	Sigap Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
		6.	Tertib Administrasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengeluaran Belanja pada Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
6.	Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan	7.	Inovasi Gerakan Berkurban Serentak Se-Sumatera Selatan
		8.	Peningkatan Mutu Pelayanan kepada Masyarakat di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Selatan melalui SIPERASEL (Sistem Pelayanan Kesra Sumsel)
7.	Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan	9.	Digitalisasi Penataan Produk Hukum Daerah melalui JDIH di Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel
8.	Biro Ekonomi Setda Provinsi Sumatera Selatan	10.	Inovasi Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak Se-Sumatera Selatan



NO	NAMA INSTANSI	JUDUL INOVASI	
9.	BPKAD Provinsi Sumatera Selatan	11.	Inventarisasi secara mandiri dalam rangka tertib Administrasi dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Aset Provinsi Sumatera Selatan
10.	Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan	12.	Peningkatan Tertib Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan Kegiatan Reses Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan
		13.	Pengelolaan Kearsipan Risalah Rapat Badan Anggaran dan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Selatan secara Elektronik di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan
		14.	Optimalisasi Pemanfaatan Perpustakaan Digital DPRD Provinsi Sumatera Selatan
		15.	ADOKE (Akselerasi Dokumentasi Kegiatan Dewan)
11.	Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan	16.	Pengelolaan Layanan Informasi Data Arsip Statis Digital Berbasis Barcode Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan
12.	BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan	17.	Sistem Informasi Kepala Desa Berakhlak pada BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan
		18.	Peningkatan Fasilitas Diklat Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Sistem Registrasi Online Berbasis Kependidikan dengan Sistem Registrasi Online Berbasis Zoho Form di BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan
		19.	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pelatihan Guna mendukung Program Transformasi Begancang BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan
13.	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan	20.	Peningkatan Sosialisasi Penanggulangan Bencana Alam ke Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan
		21.	Kesepakatan Bersama antar Kabupaten/Kota dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan di Wilayah Perbatasan
		22.	Peningkatan Kinerja Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan melalui Aplikasi SIPERJAKA pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan
14.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan	23.	Penanaman Nilai-Nilai Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Sosialisasi pada Peserta Didik Tingkat Menengah di Provinsi Sumatera Selatan
		24.	Pengelolaan Arsip Surat Masuk dan Surat



NO	NAMA INSTANSI	JUDUL INOVASI	
			Keluar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan
		25.	Strategi Penyusunan Anggaran dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan
		26.	Sistem Informasi dan Komunikasi Forum Kerukunan Umat Beragama melalui Website "Sumsel Zero Konflik" pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov Sumsel
15.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan	27.	"Pojok Layanan" Fasilitasi Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16.	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	28.	Inovasi Gerakan Sumsel Mandiri Pangan Goes To School Serentak Se-Sumsel
17.	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan	29.	Inovasi Gerakan Penanganan Stunting Serentak Se-Sumatera Selatan
		30.	Inovasi Gerakan Pengangkatan Anak dan Orang Tua Asuh Serentak Se-Sumatera Selatan
		31.	Inovasi Gerakan Penimbangan Balita Serentak Se-Sumatera Selatan
		32.	Inovasi Gerakan Serentak Pelayanan Keluarga Berencana Se-Sumatera Selatan
		33.	Peningkatan Pelayanan Tamu-Tamu pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan melalui Sistem Aplikasi SIFASANTAM
		34.	Sistem Pelayanan Pengaduan dengan menggunakan Aplikasi Sumsel Tanggap di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
		35.	Digitalisasi Pelaporan Program Pelayanan Kesehatan Tradisional (DIORKESTRA) Tingkat Provinsi Sumatera Selatan di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
		36.	Peningkatan Pelatihan Kesehatan Terakreditasi melalui Metode Perkonsultasian di UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
18.	Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan	37.	Tata Kelola Penyelenggaraan Layanan Kesehatan Jiwa Berbasis Hak Mutu WHO (WHO Quality Right) di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumsel
		38.	Sistem Informasi Panduan Administrasi Kepegawaian Berbasis Elektronik di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan



NO	NAMA INSTANSI	JUDUL INOVASI	
19.	RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan	39.	Layanan Konseling Obat Pasien Melalui Media Sosial dan Petugas Apoteker pada RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan
		40.	Manajemen Sistem Informasi Informasi Pendidikan Berkelanjutan (SIDILAN) di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan
		41.	SiBaper (Sistem Informasi Barang Persediaan)
		42.	Jerami Sifat (Jejaring Kemitraan RSUD Fatimah)
		43.	Welcome Nurse and Midwife
		44.	ALAD LABOR (Aplikasi Laporan Dinas Laboratorium)
		45.	SEPPAKAD (Sistem Pengajuan dan Pengendalian Keputusan Direktur)
		46.	Pengembangan pada Aplikasi Reminder
		47.	ALPHA (Aplikasi Layanan Pengaduan dan Harapan)
		48.	Sistem Informasi Bed Manajemen
		49.	Bridging E-BLUD dan Bank Sumsel Babel dalam Penatausahaan Keuangan BLUD
		50.	Penerapan Perhitungan Unit Cost pada Tarif Layanan RSUD Siti Fatimah dengan Metode Activity based Costing
		51.	POLI KUSUKA (Pemanfaatan Fasilitas Pelayanan Medik dengan Inovasi Poli Khusus Karyawan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan)
		52.	STARLA (Sistem Informasi Tarif Paket Layanan di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan)
53.	Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) berdasarkan ISO/IEC 27001:2022 di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan		
20.	Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera Selatan	54.	Pembangunan Sistem Informasi Publikasi Laporan Keperawatan Berbasis Elektronik pada Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera Selatan
21.	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan	55.	Jaga Sungai di Provinsi Sumatera Selatan
		56.	Inventarisasi Kawasan Terindikasi Tanah Terlantar
		57.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Jas Laboratorium Berbasis Online melalui SIMPELLAB pada UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan



NO	NAMA INSTANSI	JUDUL INOVASI	
		58.	Implementasi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 5889 Tahun 2021 sebagai Pedoman Standar Perencanaan Program Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan
22.	BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan	59.	Inovasi Aplikasi SIGertak
		60.	Upaya Penguatan Sumber-Sumber Pendanaan dalam rangka Pembiayaan Non APBD/N dengan Pemberdayaan CSR di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan
23.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan	61.	Inovasi Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Energi Serentak Se-Sumatera Selatan
		62.	Digitalisasi Penyimpanan Arsip Surat Menyurat dan Arsip Lainnya menggunakan Google Drive Cabang Dinas Regional VI Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan
		63.	Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah di Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		64.	Optimalisasi Pendataan Tambang Tanpa Izin (PETI) Pasir dengan menggunakan Titik Koordinat pada Kantor Cabang Dinas Regional VII Dinas Energi dan Sumber
24.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan	65.	Inovasi Gerakan Bedah Rumah Serentak Se-Sumatera Selatan
		66.	Inovasi Gerakan Pembangunan Santasi Serentak Se-Sumatera Selatan
		67.	Pengawasan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Kontruksi untuk Kegiatan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Permukiman di Provinsi Sumatera Selatan
		68.	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh di Provinsi Sumatera Selatan
		69.	Optimalisasi Penataan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan melalui Sosialisasi di Desa Ibul Besar II Kecamatan Pemulutan Kabupaten OI
25.	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan	70.	Pengelolaan Daerah Irigasi Berbasis Geographical Information System Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan
		71.	Pengelolaan Data dan Informasi Hidrologi secara Digital di Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Musi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan



NO	NAMA INSTANSI	JUDUL INOVASI	
		72.	Tertib Pengelolaan Administrasi Perlengkapan pada UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (BPSDA) Wilayah Sungai Musi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan
		73.	Upaya Peningkatan Kinerja Petugas Pintu Air Berbasis Aplikasi E-Paksi dalam Penataan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan
		74.	Upaya Peningkatan Kinerja Petugas Pintu Air Berbasis Aplikasi E-Paksi dalam Penataan Pengelolaan Irigasi pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan
26.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan	75.	Pengolahan Data Rencana Investasi Pelaku Usaha Berbasis Online Form dengan Media QR-Code Scanning pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan
		76.	Pemutahiran Data Potensi dan Peluang Investasi pada Sistem Informasi "Sumsel Awareness Investment" yang Berbasis Investment Project Ready To Offer (IPRO)
27.	Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan	77.	Sistem Informasi Potensi Desa/Kelurahan Terintegrasi (SI PDKT) Untuk Inovasi di Provinsi Sumatera Selatan
		78.	Digitalisasi Bahan Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi Data Potensi Inovasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (DIPERI)
		79.	Peningkatan Kinerja Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal secara Digital melalui Aplikasi SI-PEPI (Sistem Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan Internal) pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
		80.	Pelaksanaan Tata Kelola Kartu Inventaris Barang Milik Daerah pada Sub Bagian Tata Usaha UPTB Science Techno Park Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan melalui Sistem Aplikasi KIR Digital
		81.	Penanaman Bawang Merah di Lahan Basah
		82.	Pengalengan Malbi Daging Khas Sumsel
		83.	Aplikasi Si Bayar Uang
		84.	Strategi Optimalisasi Penguatan Inovasi melalui One Day One Innovation
28.	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera	85.	SI JANGKO (Sistem Informasi Aplikasi Penunjang Perkoperasian) di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera



NO	NAMA INSTANSI	JUDUL INOVASI	
	Selatan		Selatan
		86.	Peningkatan Pelayanan kepada Koperasi dengan Kebijakan Sistem Aplikasi Koperasi Berbasis Teknologi Informasi (Sakti)
29.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan	87.	Peningkatan Pelestarian dan Perlindungan Ikan Endemik Lokal melalui Operasional Pengawasan Terpadu di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan
30.	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan	88.	Inovasi Gerakan Mudik Gratis Serentak Se-Sumatera Selatan
		89.	Implementasi Kartu Uang Elektronik (K.U.E) sebagai Alat Pembayaran di Light Rail Transit (LRT) Sumsel pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan
		90.	Pendataan Penempatan Kapal Sungai dan Danau melalui Web Sistem Informasi Angkutan Sungai dan Danau Sumsel
		91.	Peningkatan Pelayanan Penertiban Rekomendasi Teknis dalam Pelayanan Perizinan pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan
		92.	Efektifitas Penerbitan Kartu Pengawasan Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum Darat Berbasis Website Online di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan
		93.	Optimalisasi Terminal Tipe B dengan Konsep Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBUs)
		94.	Sistem Pengawasan Online Angkutan Orang dan Angkutan Barang (SIPORA)
31.	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan	95.	Srunting Sakti (Samsat di Warung/Toko Paling Seketika, Akurat dan Pasti)
		96.	Optimalisasi Penatausahaan Laporan Penerimaan pada Kabupaten/Kota yang disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel
		97.	Digitalisasi Pelayanan Pendaftaran melalui Mesin Antrian Digital di UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Musi Banyuasin I Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel
		98.	Pengembangan dan Perluasan Sistem Pembayaran Elektronik Samsat Online Regional (E-Dempo) melalui Indomaret dan Tokopedia
		99.	Si-ABDI (Sistem Absensi Digital Berbasis Smart Phone)
		100.	Menerapkan Pelayanan Pajak melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah



NO	NAMA INSTANSI	JUDUL INOVASI
		(ETPD) Modern channel seperti QRIS, EDC (Elektronik Data Capture), Indomaret dan Tokopedia
		101. Pengimplementasian Aplikasi Layanan Samsat Online Sumsel (SOS), E-Dempo (Elektronik Data dan Sistem Pajak Daerah Online), SIGNAL (Samsat Digital Nasional)
		102. Peningkatan Pelayanan Kesamsatan melalui SAMDES (SAMSAT DESA)
32.	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan	103. Inovasi Gerakan Sumsel Mandiri Pangan Goes To Office Serentak Se-Sumatera Selatan
		104. Inovasi Toko Kepo
		105. Inovasi Toko Kepo Keliling
		106. Sertifikasi dan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan melalui Laboratorium Pengujian Sampel pada Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan
		107. Digitalisasi Pelaporan Data Ketersediaan Kebutuhan dan Harga Pangan Strategis Daerah di Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumsel
		108. Gerakan Sumsel Mandiri Pangan Masuk Sekolah (G-SMP MaS)
		109. Persiapan Pelaksanaan Data Panel Harga Pangan ke Tingkat Kecamatan
33.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	110. Inovasi Gerakan Perlindungan Pekerja Rentan Se-Sumatera Selatan
		111. e-Pengaduan
34.	Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan	112. Inovasi Gerakan Pasar Murah Serentak Se-Sumatera Selatan
35.	Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel	113. Optimalisasi Pemanfaatan Data Spasial untuk mendukung Tata Kelola Potensi Gangguan Usaha dan Kebakaran Lahan Perkebunan
		114. Pengembangan Sistem Data Peremajaan Karet dalam rangka Penerapan Pola Jarak Tanam Ganda di Provinsi Sumatera Selatan
36.	BPBD Provinsi Sumatera Selatan	115. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dalam Menghadapi Kesiapsiagaan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Provinsi Sumatera Selatan
		116. Peningkatan Kapasitas SDM melalui Pelatihan ACLS dan BTCLS Petugas UPTB Trauma Center dan Pelayanan Kesehatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi



NO	NAMA INSTANSI	JUDUL INOVASI
		Sumatera Selatan
		117. Pengembangan Pengelolaan Permintaan dan Pendistribusian Logistik Bantuan Korban Bencana melalui Aplikasi Sistem Informasi Usulan Permintaan dan Pendistribusian Logistik Bantuan Korban Bencana (Si-Ulo Kobra)
		118. Layanan Trauma Healing Pasca Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan
		119. Sistem Informasi Laporan Kebakaran Hutan Lahan (SILKA) dalam Peningkatan Efektifitas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
37.	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan	120. Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Elektronik (E-ARSIP) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan
		121. Penguatan Kapasitas dan Layanan Sistem Informasi Tanaman Pangan "SITAMPAN" pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan
		122. Sistem Informasi Perlindungan Tanaman (SIPETA) pada UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan
38.	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan	123. Pengembangan Ekowisata Minahutan Taman Mata Mangrove
		124. Mitigasi Gangguan Kawasan Hutan Berbasis Sistem Informasi Jaga Kawasan Hutan Sumatera Selatan (SI JANTAN SUMSEL)
39.	Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan	125. Peningkatan Layanan Perpustakaan melalui Kegiatan Konservasi, Perbaikan dan Perawatan Bahan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan
		126. Efektivitas dan Efisiensi Administrasi Keuangan Pertanggungjawaban SPJ melalui Verifikasi Sistem Checklist pada Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan
		127. Gerakan Literasi Bahasa Isyarat
40.	Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan	128. Pelayanan Kesehatan Terpadu pada Lansia di UPTD Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan
		129. Pembinaan Kehoranian dalam Pendampingan Kesejahteraan Sosial Anak pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan
		130. Inovasi Rompi Keselamatan Tuna Netra



NO	NAMA INSTANSI	JUDUL INOVASI	
41.	Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan	131.	Inovasi Gerakan Serentak Se Sumsel Minum Kopi Terbanyak di Pinggir Sungai
42.	Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan	132.	Strategi Peningkatan Mutu Pelayanan UPTD Laboratorium Bahan Kontruksi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
		133.	Provincial Kabupaten Road Management System (PKRMS) di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
		134.	Upaya Pengendalian dan Pengelolaan Alat-Alat Berat melalui Digitalisasi Data dan Informasi (e-ALKAL) pada Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel
		135.	Akselerasi Standart Operasional Prosedur (SOP) Administrasi dan Pelaporan Kegiatan UPTD Jalan dan Jembatan Kota Palembang Dinas Pekerjaan Umum Bina dan Tata Ruang Provinsi Sumsel
		136.	Peningkatan Pelayanan Mutu dalam Pembuatan Design Mix Formula Pekerjaan Jalan dan Jembatan di UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel
		137.	Sistem Informasi Bantuan Keuangan Bidang Kebhinamargaan (SIBUK BIMA) kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel
		138.	Digitalisasi Laporan Progres Kegiatan Bidang Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel (e-PROGRES)
		139.	SI JANTAN BIMA (Penyusunan Sistem Informasi Database Jalan dan Jembatan di Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel Berbasis Webgis)
		140.	Inventarisasi dan Pembuatan Database Kondisi dan Kerusakan Perkerasan Jalan Berbasis ARC-GIS pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
		141.	Upaya Peningkatan Pelayanan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumsel
		142.	SISTEM PENGELOLAAN DATA TEKNIS RUAS JALAN PROVINSI (SI - ANDALAN)
		143.	"SIP - KAWAN SUMSEL" pada UPTD jalan dan jembatan



NO	NAMA INSTANSI	JUDUL INOVASI	
		144.	Percepatan Kemantapan Jalan di Provinsi Sumatera Selatan berbasis Skala Prioritas Penanganan Jalan Longsor
		145.	Penertiban Administrasi Pengamanan Barang Milik Daerah yang dikelola Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel
		146.	Katalogisasi Pengujian Bahan/Material Konstruksi di UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel
		147.	Fasilitasi Penyediaan Sarana Loker Pembayaran pada UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel
43.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan	148.	Inovasi Gerakan Serentak Desa Bersih Narkoba Se-Sumatera Selatan
		149.	Pembinaan Manajemen Badan Usaha Milik Desa Bersama di Kawasan Perdesaan Provinsi Sumatera Selatan
		150.	Penguatan Pengetahuan Perangkat Desa tentang Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022
44.	SMA/SMK Kabupaten Banyuasin	151.	Pengimbasab Kurikulum Mereka Dengan Strategi Kartu Pintar "Pendekar"
		152.	Kartu Pelajar Terintegrasi dengan E-Library SiTAMMPAN
		153.	Aplikasi Fliphtml5 Untuk Meningkatkan Literasi Siswa Melalui E-Library SiTAMMPAN
		154.	Strategi Penerapan Pengembangan Komunitas Berbasis Aset (PKBA) Menuju Transformasi Sekolah Sehat
		155.	Kearifan Lokal Pemanfaatan Jamur Grigit Menjadi Makanan Sehat "Masroom Grigit Chees Stik"
		156.	Menghilangkan Bau Amis Pempek Dengan Timun
		157.	Pemanfaatan Daun Kering Untuk Karya Seni Arstistik
		158.	Media Tanam Bioplasma
		159.	Pembelajaran P5 Kreatif Berinovasi membuat makanan berbahan dasar singkong dengan varian warna alami
45.	SMA/SMK Kota Palembang	160.	Implementation of Gender Equality
		161.	Metaponik (Media Tanam Hidroponik Organik)
		162.	MOKA APPS (MEDIA INFORMASI PENANGANAN KRISIS AIR) BERBASIS



NO	NAMA INSTANSI	JUDUL INOVASI
		ANDROID
163.		Utilization Jumputan Waste Water By O-GLOW (Optimization Galvani Cell As Electro from Wasterwater)
164.		Perilaku Masyarakat terhadap Air Sungai di Sekitaran Aliran Anak Sungai Musi (MASAIR INDOSAT)
165.		GePeNgan PeTan (Gel Pengharum Ruangan Pengurang Polutan) dengan Ekastrak Sansevieria trifasciata dan Ekstrak Terminalia
166.		Debog Crispy
167.		WEBE (IoT Based pH Water Communicator Using Telegram) to Encourage Society Controlling Raw Water Supply
168.		The Influence of Positive and Negative Affirmation from The Educators on Students's Mentality
169.		Cindoll (Culture Indonesian Doll) for future atau Boneka budaya rajut berbahan dasar limbah kantong plastik
170.		T-REX Of A sebagai Penjernih Air Limbah Laundry menggunakan Arang Aktif Cangkang Ketapang (Terminalia catappa)
171.		Analisis Pemahaman Produk Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Minat Menabung di Bank Syariah
172.		Statlock (Stationay Clock)
173.		Metode Adsorpsi Dengan SISA-PALIT guna mengolah Limbah Air Wudhu (LAW)
174.		Modifikasi Biopori dengan (Serseriabolam) Serat Sansevieria trifasciata dan Karbon Aktif Tulang Ayam Guna Pemanfaatan Kembali Air Limbah
175.		BADAI-LAB (Bangle, Dringo, Serai, dan Limbah Air Beras) sebagai Pestisida Nabati untuk Pengendalian Hama
176.		RRC (Recycle Rain Coat)
177.		PLATCOR (Innovation of leak-proof ceiling by utilizing moringa leaves, water hycint and plastic waste)
178.		ALFOTAS (Alumunium Foil With Tea Dregs Waste Innovation Collaboration As A Friendly Waste Water Purifier)
179.		PETIKAN MIVICHEN (Pemanfaatan limbah plastik dan mikroalga (Chlorella vulgaris) untuk konversi CO2 menjadi O2)
180.		AK-BATEEQ JUMPANG (ANGGIE KARTIKA BATIK JUMPUTAN DAUN KETAPANG)



NO	NAMA INSTANSI	JUDUL INOVASI
		181. AFFECTIVITIES OF FACILITIES, TEACHING STAFF AND SCHOOL PROGRAM TO STUDENT AND EDUCATION QUALITY IN A SCHOOL
		182. Pengaruh Penambahan Ampas Kopi pada Pertumbuhan Tanaman Tomat (Penanda Hemat)
		183. SAGA'S BAG
		184. SHOW WAFER (Straightforward Water Purifier) : Powered by a Dinamo and a Combination of Filtering and Coagulation Techniques PAUSE (Propeller Battery House)
		185. Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Air Tanah Melalui Teknologi PAMSIMAS di Desa Lorok Kabupaten Ogan Ilir
		186. SAPI BAKAR SENA (Sampah Pirolisis menjadi Bahan Bakar Secara Sederhana)
		187. Uji Efektivitas Eco Enzyme sebagai Obat Alternatif Penyembuhan Luka pada Kulit Tikus (Mus musculus) Jantan Galur Swiss Webster
		188. Efektivitas Penggunaan Lidah Buaya (Aloe vera) dan Ekstrak Daun Belimbing Wuluh (Averrhoa bilimbi L) terhadap Nilai Uji SPF (Sun Protection Factor) dan Sifat Fisik Tabir Surya
		189. Penggunaan Media Sosial sebagai Pemicu Gejala FoMO (Fear of Missing Out) dan Gaya Hidup Konsumtif pada Pelajar SMA Kusuma Bangsa
		190. Pembuatan Panel Surya Mini menggunakan Kaleng Bekas dan Baterai Handphone Bekas
		191. Pembuatan Alat Sederhana sebagai Filtrasi Air Lembah
		192. Toxic Masculinity menjadi Pemicu terjadinya Kekerasan di dalam sebuah hubungan
		193. Pengaruh Intensitas Belajar terhadap Tingkat Stres Siswa Studi Kasus Siswa SMA Xaverius I Palembang
		194. Perkembangan Pusat Kota Kawasan Seberang Ulu Kota Palembang
		195. Kinerja Keuangan Perusahaan Penghasil Energi di Provinsi Sumatera Selatan : Studi Kasus Perusahaan PT. Bukit Asam
		196. Kebutuhan Teknologi AQMS sebagai Pencatat Informasi Pencemaran Udara untuk Kota Palembang
		197. Peningkatan Literasi Siswa Kelas X Plus Negeri 17 Palembang melalui Pemanfaatan Google Slide dan QR Code dalam Pembelajaran Materi Biologi Topik Klasifikasi Makhluk Hidup



NO	NAMA INSTANSI	JUDUL INOVASI
		198. Asesmen Digital Berbasis Kahoot dalam Evaluasi Pembelajaran Biologi Kelas X SMA Plus Negeri 17 Palembang
		199. Pemanfaatan Aplikasi Quizizz sebagai Media Pembelajaran Biologi Kelas X SMA Plus Negeri 17 Palembang
		200. Mempromosikan Kuliner Sumatera Selatan melalui Lakso Instan
		201. Pemanfaatan Limbah Sekam Padi menjadi Kertas Seni Kedap Air
		202. Kesepian Sosial Siswa/I SMA Negeri Sumatera Selatan
		203. MILANTAH : Membran Poliamida dan Arang Aktif sebagai Penjernihan Minyak Jelantah
		204. Efektivitas Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) terhadap Pengembangan Kemampuan Kognitif Siswa di SMAN Sumatera Selatan
		205. Gambaran Perceived Social Support di Sekolah Berasrama dengan House System dan Pengaruh terhadap Homesickness di SMAN Sumatera Selatan
		206. KOJAO : Koyo Custom Remaja Jompo Pemanfaatan Ekstrak Jahe, Kunyit dan Cabai sebagai Komposisi Koyo
		207. (KOGEMBIRA) Konstruktivisme dan Geografis Wilayah Terhadap Mitos Antu Banyu di Sungai Musi
		208. CAT GLASSES INNOVATION : Effectiveness in The Dark Condition
		209. Pemanfaatan Fermentasi Limbah Kulit Buah Menjadi Biogas sebagai Energi Alternatif
		210. Penggalakkan Kembali Program Pembuatan Pupuk Kompos Berbahan Dasar Limbah Organik (PROPOS) di SMAN Sumatera Selatan
		211. Pengaruh teknologi Terhadap Minat Baca Siswa-Siswi di Perpustakaan SMAN Sumatera Selatan
		212. Achieving SDGs Clean water and Sanitation Through The Utilization of Eco-Enzyme and Guava leaves As Raw Materials for Making Enviromentally Friendly Organic Chlorine
		213. Pemanfaatan Limbah Masker Medis Covid-19 menjadi Bunga dan Guci
		214. Pengolahan Keripik Pangsit Wortel sebagai Cemilan yang sehat
		215. Pendaauran Ulang Sampah Kertas
		216. Pembuatan Tapai Pisang
		217. Pemanfaatan Botol Bekas menjadi Pot Bunga



NO	NAMA INSTANSI	JUDUL INOVASI
		Hias Gantung
218.		Pembuatan dan Pengaplikasian Alat Penjernih Air
219.		Fermentasi dalam Pembuatan Tapai Singkong
220.		Pemanfaatan Limbah Kulit Bawang Merah menjadi Pestisida Nabati
221.		Pemanfaatan Pipet Plastik menjadi Kreasi Bunga Warna Warni
222.		Pembuatan Motif Jumputan
223.		Pengembangan e-book Jurnal Umum untuk Pembelajaran Akuntansi
224.		Pembuatan Buku Antologi "Caption in Memory"
225.		PENUSA (Pekan Numerasi Sekolah)
226.		Differensiasi PS
227.		BABA (Bantal Antibakteri Alami) dengan Memanfaatkan Serat Lidah Mertua (<i>Sansevieia trifasciata</i>), Ekstrak Daun Pucuk Merah (<i>Syzygium myrtifolium</i> Walp) dan Eceng Gondok (<i>Eichhornia crassipes</i>)
228.		ANTLUM (Anti Lumut dan Retak pada Paving Block Berbahan Ramah Lingkungan dengan Memanfaatkan Fly Ash, Limbah Plastik dan Kulit Pisang (<i>Musa balbisiana</i>))
229.		Pengaruh Spy Sistem Terhadap Tingkat Integritas Siswa SMAN Sumatera Selatan
230.		BIO-DAKECA : Biopestisida Ekstrak Daun Ketapang Kencana (<i>Terminalia mantaly</i>) sebagai Alternatif Pengendalian Hama pada Tanaman
231.		MARIPOSA (Material Komposit Biodegradable Serat Ampas Tebu dan Serat Sabut Kelapa) Berpenguat Matriks Alam sebagai Alternatif Material Unmanned Aerial Vehicle (UAV)
232.		Pengaruh Minat Penggunaan Bahasa Indonesia di Negara Asing
233.		AMANDEMEN (Analisis Manajemen Waktu dalam Menyeimbangkan Pembelajaran, Berinovasi, serta Kehidupan Berasrama) Siswa-Siswi SMAN Sumatera Selatan
234.		BAGRAFO (Banana Biodegradable Foam) : Styrofoam Ramah Lingkungan dari Limbah Kulit dan Pelepah Pisang
235.		MURAMASA (Murid Pencipta Masa Depan)
236.		GPRPP : Gel Pengharum Ruangan Pengurang Polutan (Pemanfaatan Ekstrak Lidah Mertua, Ekstrak Daun Ketapang, dan Ekstrak Bunga Kamboja sebagai Bahan Pengurang Polutan)



NO	NAMA INSTANSI	JUDUL INOVASI	
46.	SMA/SMK Kabupaten MURATARA	237.	Pengembangan Game Edukasi Berbasis Petualangan untuk mata pelajaran Fisika materi Usaha dan Energi
		238.	Media Pembelajaran Edu Game Berbasis Canva
47.	SMA/SMK Kota Prabumulih	239.	“Nature In Fashion” Busana Pesta dengan Teknik Ecoprint Daun Pewarna Alami
		240.	Pemanfaatan tumbuhan pisang sebagai bahan pembuatan burger Pisla (Burger Pisang Segala)
		241.	Pemanfaatan batang papaya sebagai bahan pembuatan kue Engkak “Engkak Bataya”
		242.	Pembuatan Shampo Seledri-Mint
		243.	Pemanfaatan Arang sebagai bahan pembuatan Semir Ban Motor/Mobil
		244.	Sampo Jeruk-Mint
		245.	Pembuat Sampo Nanas Lida Buaya-Mint
		246.	Pemanfaatan Oli Bekas sebagai penghitam dashboard kasar dan semir sepatu
48.	SMA/SMK Kota Lubuklinggau	247.	Pembersih lantai kamar mandi aroma sereh skanpol
		248.	Aplikasi Point Tata Tertib Siswa Online (SI PONTA) SMK Negeri 3 Lubuk Linggau
		249.	Sistem Informasi Manajemen Praktek Kerja Lapangan (SIM PKL) di SMK Negeri 3 Lubuk Linggau
		250.	SIMAK (Sistem Informasi Administrasi Kepegawaian) SMK Negeri 3 Lubuk Linggau
		251.	Kursi dan Meja dari Spare Part Bekas (Otomotive Furniture)
49.	SMA/SMK Kabupaten Ogan Ilir	252.	Praktek Produk Kreatif Kewirausahaan (Brownies Alpokat)
		253.	Pembuatan Baglog Jamur Padi
		254.	Pembuatan Sirup Kalamansi
		255.	Agro Eko Edu Wisata Melon
		256.	Mobil Pembasmi Rumput Berbasis IOT



7. Penutup

Selaku Penjabat Gubernur Sumatera Selatan, kami telah berupaya melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sejalan dengan yang telah digariskan dan berkat adanya dukungan dari seluruh Badan, Dinas, Biro dan Kantor di Jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta seluruh masyarakat Provinsi Sumatera Selatan. Alhamdulillah syukur, Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan pelaksanaan tugas-tugas Tahun 2024 yang meliputi penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan telah menunjukkan perkembangan, kemajuan dan peningkatan yang cukup menggembirakan. Apa yang kita lakukan bersama-sama selama Tahun 2024 semata-mata ditujukan bagi kepentingan dan kesejahteraan seluruh rakyat dan lapisan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan.

Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan berbagai program/kegiatan banyak ditemukan kendala-kendala, kendati pada umumnya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini merupakan modal bagi evaluasi dan penyempurnaan di tahun-tahun mendatang.

Segala dukungan yang telah diberikan kepada kami, dengan tulus disampaikan ucapan terima kasih, dengan dukungan tersebut telah memberikan kekuatan dan semangat untuk bekerja keras, diikuti semangat pengabdian dalam mengemban tugas yang mulia ini. Ucapan terima kasih yang sama juga disampaikan kepada seluruh pihak atas saran, koreksi dan kritik, khususnya terhadap pelaksanaan kegiatan Tahun 2024.

Kesemuanya itu, merupakan wujud rasa ikut bertanggung jawab dari semua pihak sebagai peran serta untuk memacu peningkatan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan yang kita cintai ini.

Untuk itu, mari kita mewujudkan Sumatera Selatan Maju untuk Semua, yang mensejahterakan warga Sumatera Selatan dengan percepatan pembangunan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan serta perlindungan-Nya kepada kita semua, Amin



**DAFTAR PENGHARGAAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024**

NO	NAMA PENGHARGAAN	TANGGAL	NAMA NEGARA/INSTANSI YANG MEMBERIKAN
1	Penghargaan kepada Provinsi Sumatera Selatan masuk kategori zona hijau kategori B (opini kualitas tinggi).	26 Januari 2024	Ombudsman Sumsel
2	Penghargaan kepada Pemprov. Sumsel atas pencapaian memenuhi Kelengkapan Atribut pada Sembilan Variabel (9/9) untuk mencapai Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Level 3 (Pro aktif).	01 Februari 2024	Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3	Pemberian Gelar Kehormatan Kanjeng Raden Tumenggung	02 Februari 2024	Keraton Surakarta Hadiningrat
4	Penghargaan atas pencapaian Pemprov Sumsel dalam memenuhi kelengkapan atribut pada sembilan variabel (9/9) untuk mencapai Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Level 3 (Pro aktif).	04 Maret 2024	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
5	Penghargaan Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dari Menteri Hukum dan HAM (Kumham) Republik Indonesia (RI)	13 Maret 2024	Menteri Hukum dan HAM (Kumham) Republik Indonesia (RI)
6	Penghargaan TOP BUMD Award 2024 atas peran dan kontribusi Kepala Daerah terhadap kinerja BUMD khususnya PT Tirta Sriwijaya Maju (PERSERODA), yang berhasil meraih predikat sebagai BUMD Teratas 2024 dengan level Bintang 4.	20 Maret 2024	Majalah Top Business
7	Penghargaan Birokrat Peduli Pers	25 Maret 2024	Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Selatan



8	Penghargaan kepada Pj. Gubernur Sumatera Selatan atas kepemimpinannya yang berdedikasi tinggi terhadap pemuda dan masyarakat sosial.	01 April 2024	Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sumatera Bagian Selatan (Badko HMI Sumbagsel)
9	Penghargaan Kartika Pamong Praja Madya kepada Pj. Gubernur Sumatera Selatan	21 Mei 2024	Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
10	Penghargaan kepada Pj. Gubernur Sumsel sebagai Sahabat dan Mitra PWI	10 Juni 2024	Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat
11	Penghargaan kepada Pj. Gubernur Sumsel sebagai tokoh sahabat Guru atas prestasi dan keberhasilannya membangun dunia Pendidikan di Provinsi Sumsel	10 Juni 2024	Media Group Network
12	Penghargaan kepada Pj. Gubernur Sumsel Bpk. Elen Setiadi, SH. M.S.E yang telah Berpartisipasi Dalam Melaksanakan Tugas Kepolisian Yaitu Berkontribusi Terhadap Penguatan Kapasitas dan Kapabilitas Polda Sumsel Dalam Pemeliharaan Keamanan Ketertiban Masyarakat.	01 Juli 2024	Kepala Kepolisian Republik Indonesia
13	Penghargaan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Penganugerahan CNN Indonesia Awards 2024 Kategori Outstanding Nasional Movement For Tourism And Development Of Creative Economy	10 Juli 2024	CNN Indonesia Award
14	Penghargaan kepada Pj. Gubernur Sumsel Bpk. Elen Setiadi, SH. M.S.E kategori Outstanding Digital Innovation For Governance Sustainability	10 Juli 2024	CNN Indonesia Award
15	Piagam Penghargaan Museum Rekor Dunia- Indonesia Minum Kopi Di Pinggir Sungai Serentak Peserta Terbanyak	13 Juli 2024	Museum Rekor - Dunia Indonesia (MURI)
16	Penghargaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kategori Provinsi	18 Juli 2024	Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Republik Indonesia



			(RI)
17	Penghargaan Bappanas Award Kategori Pelaksana Gerakan Pangan Murah Provinsi Tahun 2023	28 Juli 2024	Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI
18	Penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atas Dukungan pada Kegiatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke-31 Tingkat Provinsi Tahun 2024 di Kota Lubuk Linggau	31 Juli 2024	BKKBN
19	Penghargaan Pemimpin Daerah Award kategori "Percepatan Pembangunan Sub Kategori Percepatan Pembangunan Melalui Infrastruktur".	08 Agustus 2024	Kementerian Dalam Negeri RI
20	Penghargaan Pembinaan Program Kampung Iklim (ProKlim) Tingkat Provinsi	9 Agustus 2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (LHK RI)
21	Penghargaan atas dedikasi dan komitmen tinggi Pemprov Sumsel dalam mewujudkan pelayanan kesehatan berbasis Universal Health Coverage (UHC)	9 Agustus 2024	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK RI)
22	Penghargaan kepada Gubernur Sumatera Selatan "Peduli Jaminan Sosial Ketenagakerjaan".	05 September 2024	BPJS Ketenagakerjaan
23	Penghargaan Anugerah Wahana Tata Nugraha Wiratama untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan karena telah berhasil menata transportasi dan fasilitas publik dengan baik	07 September 2024	Menteri Perhubungan RI
24	Penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang telah mengikuti Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Sistem Transportasi Perkotaan tahun 2024	07 September 2024	Menteri Perhubungan RI
25	Penghargaan Rookie Of The Year 2024	23 September 2024	Kementerian Koordinator Bidang



			Perekonomian (Kemenko) Republik Indonesia (RI)
26	Penghargaan Seven Media Award 2024 dengan Kategori Pemimpin Inspiratif Terbaik Indonesia "Kolaborasi, Sinergi, Keteladanan dan Integritas.	27 September 2024	Seven Media Asia
27	Penghargaan Anugerah Layanan Investasi 2024 kategori Pemerintah Provinsi Terbaik Ketiga Nasional	28 September 2024	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia (RI),
28	Penghargaan pada Bhumandala Award Tahun 2024 yaitu Bhumandala Kanaka (Medali Emas) untuk kategori Provinsi Bhumandala Kinerja Sempul Jaringan Informasi Geospasial (IG)	04 November 2024	Badan Informasi Geospasial (BIG) Republik Indonesia (RI).
29	Penghargaan pada Bhumandala Award Tahun 2024 yaitu Bhumandala Ariti (Medali Perunggu) untuk Kategori Provinsi Bhumandala Nama Rupabumi	04 November 2024	Badan Informasi Geospasial (BIG) Republik Indonesia (RI).
30	Penghargaan pada Bhumandala Award Tahun 2024 yaitu Pemprov Sumsel meraih Penghargaan Geoportal Terbaik	04 November 2024	Badan Informasi Geospasial (BIG) Republik Indonesia (RI).
31	Penghargaan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Penganugerahan Indeks Maturitas Tata Kelola SPK Tahun 2024	20 November 2024	Badan Standarisasi Nasional
32	Penghargaan kepada Pj. Gubernur Sumsel Bpk. Elen Setiadi, SH. M.S.E menerima Piagam Penghargaan Innovative Government Award (IGA) sebagai Provinsi Terinovatif	5 Desember 2024	Menteri Dalam Negeri
33	Penghargaan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atas dedikasi Pemprov Sumsel yang telah Membina dan Membangun Kabupaten atau Kota Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2023	10 Desember 2024	Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia



34	Penghargaan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Penganugerahan sebagai Badan Publik Informatif dengan nilai 97,33	17 Desember 2024	Komisi Informasi Pusat.
35	Penghargaan Perunggu Anugerah Kebudayaan Indonesia (AKI) kategori Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi Tahun 2024	18 Desember 2024	Kementerian Kebudayaan RI